

Kekerasan Objektif dalam Narasi Global War on Terror (GWOT) : Analisis GWOT dengan Teori Kekerasan Slavoj Zizek

Kurniawan Dwi Saputra

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia
Email : poetra8th@gmail.com

Abstrak

Global War on Terror (GWOT) adalah suatu gerakan untuk memerangi terorisme internasional. Gerakan ini merupakan strategi komprehensif untuk mengalahkan terorisme dalam setiap aspek, dari militer ke ekonomi, dan dari politik ke budaya. Namun, penerapan paket GWOT secara universal mencakup tingkat kekerasan tertentu. Pelanggaran tersembunyi di balik GWOT harus dianalisis dalam penelitian ini dengan menyoroti kerangka kerja Slavoj Zizek tentang jenis kekerasan. Zizek mengklasifikasikan kekerasan menjadi dua cabang utama: subyektif dan obyektif. Kekerasan objektif terdiri dari dua pelanggaran universal: simbolis, yang merupakan pemaksaan universal dari istilah linguistik, dan sistemik, yang berfungsi mulus dari sistem apa pun. Oleh karena itu, GWOT termasuk kekerasan objektif. Pertama, penganan universal dari istilah oposisi biner dalam propaganda kontra-terorisme, "bersama kami atau melawan kami," mewakili logika kekerasan obyektif. Kedua, propaganda GWOT menyebabkan lahirnya undang-undang tertentu yang melanggar prinsip hak asasi manusia. Pelecehan sistematis ini merupakan masalah karena bukti faktual menunjukkan bahwa itu adalah terorisme dan bukan inspirasi di masa depan.

Kata Kunci: *Kontra terorisme, Perang global, kekerasan obyektif, Slavoj Zizek.*

Objective Violence in the Narrative of Global War on Terror (GWOT): GWOT Analysis with Violence Theory Slavoj Zizek

Kurniawan Dwi Saputra

Department of Islamic Education, Faculty of Islamic Studies,
Islamic University of Indonesia

Abstract

Global War on Terror (GWOT) is a movement to combat terrorism internationally. It involves comprehensive strategy to defeat terrorism in every aspect, from military to economics, from politics to culture. However, the universal imposition of GWOT package includes certain degree of violence. The hidden violences behind GWOT are to be analysed in this research by the light of Slavoj Zizek's framework regarding types of violence. Zizek classifies violences into two main branches: subjective and objective. Objective violence consists of two related violences: symbolic, which is a universal imposition of linguistic terms, and systemic, which is smooth functioning of any system. GWOT therefore includes objective violences. First, its universal imposition of binary opposition term in counter-terrorism propaganda, "with us or against us," represents the very logic of objective violence. Second, GWOT propaganda brings about the production of certain laws that violates the principle of human rights. This systematic abuse is a matter of concern because the factual evidences show us that it does not solve terrorism but rather inspires its reemergence in the future.

Keywords: *Counter-terrorism, Global War on Terror, violence, objective violence, Slavoj Zizek.*

PENDAHULUAN

Pasca serangan 9/11, George W. Bush selaku presiden Amerika mengumumkan perang global melawan terorisme (GWOT). Selain berskala global karena menjangkau seluruh negara yang ada di dunia, GWOT juga merupakan strategi perang yang komprehensif, menysasar segala aspek kehidupan yang berkaitan dalam upaya pemberantasan terorisme, dari diplomasi, intelijen, militer hingga ekonomi dan budaya.¹ Dalam pidatonya, Bush menga-

¹ U.S. Department of State, The Coalition Information Centers, "The Global War on Terrorism: The First 100 Days," , diakses melalui <https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/wh/6947.htm>.

takan bahwa serangan teroris adalah serangan terhadap peradaban.² Bush menyatakan bahwa teroris adalah pihak jahat yang memerangi pihak yang baik, yaitu peradaban Barat yang diwakili oleh Amerika dengan nilai-nilainya. Pidato Bush yang banyak menyinggung mengenai serangan terhadap nilai peradaban sejatinya mengafirmasi teori *clash of civilizations* Samuel Huntington, bahwa konflik kini tidak lagi didasari oleh perbedaan ideologi maupun masalah ekonomi, tetapi oleh motif budaya dan agama.³ Dalam kasus terorisme, kalangan teroris melandaskan aksinya dengan legitimasi religius dan menyerang nilai-nilai peradaban Barat.

Pandangan Samuel Huntington tersebut, menurut Slavoj Žizek, adalah kulturalisasi politik; sebuah upaya mendistorsi antagonisme politik menjadi fenomena kultural.⁴ Kulturalisasi politik menyokong klaim ideologi kontemporer bahwa politik telah mati, tak ada lagi kepentingan politik dalam tata kelola masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam era *post-politics* bertujuan meraih kesejahteraan dan keamanan masyarakat yang diwujudkan dengan mekanisme administrasi dan manajerial semata. Kalkulasi yang terjadi di dalam tata kelola tersebut adalah perhitungan efektivitas dan efisiensi utilitarian. Fenomena ini mendukung teori *end of history*-nya Fukuyama, karena menguatkan konsensus bahwa sistem tata kelola pemerintahan yang terbaik adalah sistem demokrasi liberal.⁵

Menurut Žizek, klaim finalitas demokrasi liberal dan *post-politics* sebagai ruang netral politik dan ideologi tersebut sebenarnya mengandung operasi ideologi. *Post-politics* muncul karena Barat menilai mereka telah memasuki masa pasca ideologi dengan kemenangan demokrasi liberal. Barat memandang tak ada ruang bagi ideologi lain untuk menyaingi sistem ini. Namun, justru di situlah ideologi berjalan. Žizek mengatakan, “ketertutupan ideologi (hegemonik) hari ini mengambil bentuk halangan mental yang mencegah kita dari membayangkan sebuah perubahan sosial fundamental, dalam kepentingan yang diduga (merupakan) perilaku yang realistis dan dewasa.”⁶

2 U.S. Department of State, The Coalition Information Centers.

3 Giovanna Borradori, Jürgen Habermas, dan Jacques Derrida, *Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida* (Chicago: University of Chicago Press, 2003), hlm. 65.

4 Slavoj Žizek, *Violence* (New York: Picador, 2008), hlm. 140.

5 Matthew Sharpe dan Geoff Boucher, *Žižek and Politics: A Critical Introduction* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010), hlm. 35.

6 Judith Butler, Ernesto Laclau, dan Slavoj Žižek, “Holding the Place,” in *Contingency, Hegemony,*

Terorisme adalah antitesis terhadap visi post-politik akan masyarakat yang sejahtera dan aman. Oleh karena itu, terorisme diperangi secara global dan komprehensif dengan GWOT. Melalui kritik atas narasi GWOT, penelitian ini mencoba menunjukkan operasi ideologi dalam era kontemporer dengan kerangka teori kekerasan dan teori ideologi Slavoj Zizek.

KEKERASAN SOS SLAVOJ ZIZEK

Pokok pemikiran Zizek dalam bukunya *Violence*, adalah kategorisasi kekerasan menjadi dua jenis, yaitu kekerasan subjektif dan kekerasan objektif.⁷ Kekerasan yang tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah kekerasan subjektif, baik berupa kekerasan fisik, seperti pemerkosaan, pembunuhan, maupun ideologi seperti rasisme, diskriminasi seksual dan lain-lain. Sementara itu, kekerasan objektif adalah kekerasan “metafisis” yang mengalir secara niscaya bersama ideologi yang ada, dalam hal ini Zizek merujuk pada kapitalisme. Kekerasan obyektif memiliki dua bentuk, yaitu simbolik dan sistemik.⁸ Kekerasan simbolik melekat pada bahasa –terma-terma dan wacana yang muncul dari sistem ideologi, sementara kekerasan sistemik merupakan malapetaka yang merupakan konsekuensi dari dinamika sistem ideologi yang berlaku.

Perbedaan antara kekerasan subjektif dan objektif terletak pada ketidakmampuan kita mengungkap kekerasan objektif. Sejatinya, kekerasan objektif bukan tidak nampak, tetapi karena adanya narasi ideologi yang menyelubunginya, ia seolah-olah menjadi kondisi normal. Misalnya kekerasan terhadap tahanan Guantanamo sulit untuk diungkap bahkan dianggap normal karena dilakukan kepada pelaku terorisme.⁹

“Bagaimanapun, kekerasan objektif ialah kekerasan yang inheren pada kondisi normal dari segala sesuatu. Kekerasan objektif tak dapat dilihat karena ia menyokong standar yang menjadi kacamata kita dalam mempersepsikan sesuatu sebagai kekerasan subjektif.”¹⁰

Universality: Contemporary Dialogues on the Left (London: Verso, 2011), hlm. 324.

7 Zizek, *Violence*, hlm. 1-39.

8 Kelsey Wood, *Zizek: A Reader's Guide* (Malden: Wiley-Blackwell, 2012), hlm. 259.

9 International Committee of the Red Cross, *Icrc Report on the Treatment of Fourteen "High Value Detainees" in CIA Custody* (Washington, D.C.: International Committee of the Red Cross, 2007).

10 Zizek, *Violence*, hlm. 2.

Selama ini, narasi ideologi mengenai kekerasan selalu diarahkan kepada penanggulangan kekerasan subyektif. Demikian karena memang kekerasan jenis ini paling nyata dan mudah mengidentifikasi pelakunya, misalnya tindakan kriminal atau terorisme. Namun menurut Zizek, kita perlu mundur beberapa langkah untuk melihat lebih jelas, faktor apa yang melandasi kemunculan kekerasan-kekerasan itu agar dapat lebih tepat mengenali masalah sebenarnya dan memberikan solusi.¹¹

Contoh mudah memahami kekerasan obyektif adalah bagaimana suatu negara yang rakyatnya menderita dan wilayahnya terdapat banyak kerusakan ekologis dilaporkan memiliki kondisi finansial yang sehat. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa term “kesehatan finansial” merupakan kekerasan simbolik. Ia menjadi selubung bagi kerusakan alam yang terjadi. Sementara itu, eksploitasi alam yang merupakan logika ekonomi kapitalisme merupakan contoh kekerasan sistemik.

Lebih dari itu, fokus terhadap kekerasan subyektif bukan saja merupakan kesalahan diagnosis atau kealpaan terhadap kekerasan obyektif, namun secara tidak langsung menunjukkan bahwa kekerasan obyektif dianggap sebagai keadaan yang normal, kondisi damai yang alami. Zizek menentang pandangan tersebut dengan mengatakan bahwa kekerasan subyektif hanyalah interupsi atas mekanisme kekerasan obyektif. Ia merupakan *divine violence*, kekerasan ilahi yang menyela kekerasan obyektif.¹² Zizek menyatakan bahwa segala wujud sistem simbolik selalu mengandaikan adanya yang lain yang terepresi.¹³ Jika kita melihat narasi perang melawan terorisme, terlihat bagaimana AS berusaha mengeksklusi teroris dari “peradaban kita.” Menurut Zizek, adanya eksklusi macam ini merupakan pertanda ada yang salah dalam ranah simbolik tersebut.¹⁴ Demikian karena logika yang berjalan adalah totalitarian, sementara dalam perspektif Hegeliannya Zizek, segala sesuatu selalu mengandaikan kehadiran lawannya.

Sementara itu, kekerasan simbolik menunjukkan nuansa Lacanian dalam pemikiran Zizek. Kekerasan simbolik yang terdapat dalam bahasa se-

11 Zizek, hlm. 1.

12 Wood, *Zizek*, hlm. 258.

13 Wood, hlm. 97.

14 Wood, hlm. 97.

cara tidak langsung merujuk kepada satu tahapan identifikasi Lacanian yaitu fase oedipal, di mana identitas subjek dikukuhkan di hadapan kuasa *the big Other* dalam wujud bahasa.¹⁵ Bahasa sebagai *the big Other* adalah sarana yang memunculkan subjek untuk hadir dalam realitas kebudayaan. Adanya kekerasan simbolik adalah niscaya karena realitas selalu hadir melalui kedigdayaan *the big Other* yang berupa bahasa. Sedangkan bahasa itu sendiri bersifat represif karena tidak mampu mewartakan secara utuh hasrat dari subjek. Determinisme bahasa juga ditegaskan Zizek ketika mengutip frase terkenal Heidegger bahwa bahasa adalah rumah berada.¹⁶

Kekerasan sistemik menunjukkan nuansa Marxis dalam pemikiran Zizek. Marx berpandangan bahwa kapitalisme mengandung daya internal yang sewaktu-waktu dapat membawa kepada kehancurannya. Salah satunya adalah faktor dehumanisasi.¹⁷ Zizek dengan kekerasan sistemik menunjukkan bahwa sistem kapitalisme yang berjalan saat ini secara otomatis mengandung kekerasan tak manusiawi yang merupakan malapetaka bagi kemanusiaan.

Dalam kerangka ini, kita dapat memahami kritik Zizek terhadap terhadap klaim matinya ideologi dalam politik kontemporer.¹⁸ Kalangan liberal menganggap politik hari ini bersih dari ideologi, dengan fokus pada manajemen dan administrasi (*post-political*). Ia juga mengklaim bebas dari ideologi dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan keamanan (*bio-political*). Bagi Zizek, administrasiasi dan depolitisasi subyek tersebut ialah ideologi itu sendiri. Klaim netralitas dari ideologi adalah ekspresi ideologis karena menunjukkan apa yang disebut Zizek dari dialektika Hegel sebagai "*coincidence of opposites*," yaitu aktualisasi ideologi yang menampakkan diri sebagai non-ideologi.

15 Hizkia Yosie Polimpung, *Asal-Usul Kedaulatan : Telusur Psikogeneologis Atas Hasrat Mikrofasis Bernegara* (Depok: Penerbit Kepik, 2014), hlm. 51-52.

16 Zizek, *Violence*, hlm. 1.

17 John E. Elliott, "Marx and Schumpeter on Capitalism's Creative Destruction: A Comparative Restatement," *The Quarterly Journal of Economics* Vol. 95, no. 1 (1980): hlm. 52, <https://doi.org/10.2307/1885348>.

18 Lihat Dusan Blejic, "Pengantar," *Slavic Review* Vol. 72, no. 4 (2013): hlm. 701, <http://www.slavicreview.illinois.edu/indexes/vol72/index.html>.

KEKERASAN OBJEKTIF DALAM GLOBAL WAR ON TERROR (GWOT)

Operasi komprehensif dari GWOT jika dianalisis berdasarkan teori kekerasan Zizek mengandung kekerasan ideologis objektif. GWOT mengandung operasi ideologis karena “perang melawan terorisme” adalah *quilting point* yang merangkum dan mengarahkan semua aktifitas dan kebijakan AS. Dalam teori ideologi Zizek, ideologi selalu memiliki satu *quilting point* yang membuat ideologi itu menjadi satu kesatuan utuh.¹⁹ GWOT juga mengandung kekerasan objektif karena membuat banyak bentuk kekerasan dianggap normal, misalnya pelanggaran HAM terhadap pelaku tindak terorisme di Guantanamo atau pembunuhan warga sipil dengan dalih operasi kontra terorisme di Pakistan.²⁰

1. Kekerasan Simbolik Oposisi Biner

Salah satu bentuk kekerasan objektif adalah kekerasan simbolik yang berjalan dalam mekanisme kebahasaan. Dalam narasi yang didengarkan GWOT, terdapat klasifikasi dikotomis yang membedakan antara pihak yang memerangi terorisme dengan pihak teroris dan siapa saja yang memberikan dukungan.

*“Serangan ini dilakukan di tanah Amerika, tetapi ini merupakan serangan pada jantung dan nyawa dari dunia yang beradab. Dunia telah (bangkit) bersama untuk memerangi perang yang baru dan berbeda, yang pertama dan kita harap satu-satunya (perang) di abad ke 21. Perang melawan mereka yang menebar teror, juga perang melawan pemerintah-pemerintah yang mendukung atau melindungi mereka.” George W. Bush.*²¹

Pernyataan tersebut mengimplikasikan oposisi biner dalam GWOT, *with us or against us*. Pihak yang memerangi terorisme adalah pihak yang baik, sementara pihak yang mendukung orang atau organisasi yang dianggap teroris adalah pihak yang jahat. Kelihatannya, hal ini tidak memiliki masalah. Akan tetapi, hal ini membawa banyak akibat negatif.

19 Slavoj Žižek, *The Sublime Object of Ideology* (London: Verso, 2009), hlm. 95-96.

20 Amnesty international, *Will I Be Next?: Us Drone Strikes in Pakistan* (New York, N.Y.: Amnesty International, 2013), hlm. 18.

21 U.S. Department of State, The Coalition Information Centers, “The Global War on Terrorism.”

Sebagai konsekuensi kebijakan ini, banyak orang dinafikan kemanusiaannya hanya karena tuduhan keterlibatan dalam tindak terorisme.²²

Narasi GWOT menjadi kebijakan kacamatanya karena hanya melihat terorisme dari satu perspektif saja. Narasi oposisi biner tersebut merupakan kegagalan memahami terorisme sebagai fenomena yang muncul dari pelbagai faktor yang kompleks.²³ Alex Schmid, dalam usahanya mendefinisikan terorisme, mengumpulkan puluhan elemen yang dipertimbangkan dalam perumusan istilah terorisme.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa terorisme bukanlah peristiwa yang dapat dengan mudah dikembalikan kepada satu faktor pemicu saja. Simplifikasi masalah terorisme sangat berbahaya karena ia membawa konsekuensi praksis politis, yaitu kriminalisasi pelakunya.²⁵

Di sini kita menemukan kekerasan simbolik, dari pengenaan makna universal bahasa.²⁶ Dalam GWOT, pengenaan narasi biner *with us or against us* menjadi landasan legitimasi politik untuk memilah antara pihak yang baik dan pihak yang buruk. Narasi ini menjadi alat ukur untuk menilai individu, organisasi hingga rezim. Akibat dari narasi ini, pemerintahan Taliban di Afghanistan dilengserkan karena melindungi Osama bin Laden. Masalahnya tidak berhenti di sini saja, masing-masing negara terkadang menjadikan label teroris sebagai upaya mendiskreditkan lawan politiknya. Israel menganggap Hamas yang notabenehnya adalah pejuang kemerdekaan Palestina sebagai teroris, seperti halnya Turki melabeli partai pekerja Kurdistan (PKK) sebagai teroris.

Pengenaan makna "*global war on terror*" adalah kekerasan objektif karena narasi ini menyembunyikan kompleksnya faktor-faktor yang melandasi kemunculan terorisme, seperti konteks sosial dan ekonomi politik.

22 Michael Josef Raab, *The Terrorist in a Postmodern Perception*. (S.l.: AV AkademikerVerlag, 2014).

23 Neil J. Smelser, *The Faces of Terrorism: Social and Psychological Dimensions*, STU-Student edition (New Jersey: Princeton University Press, 2007), hlm. 12, <https://www.jstor.org/stable/j.ctt7rqvk>.

24 Alex Peter Schmid, *The Routledge Handbook of Terrorism Research* (New York; London: Routledge, 2013), hlm. 76-83.

25 Alex Peter Schmid, "Terrorism - The Definitional Problem," *Case Western Reserve Journal of International Law* Vol. 36, no. 2 (2004): hlm. 375-419, <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol36/iss2/8>.

26 *Imposition of certain universe of meaning*. Zizek, *Violence*, hlm. 2.

2. Kekerasan Sistemik Operasi Kontra Terorisme

Sementara itu, kekerasan sistemik sebagai *smooth functioning of system*, berjalan beriringan dengan kekerasan simboliknya. Dengan kerangka sistem yang terbentuk akibat pengenaan makna “*global war on terror*,” pemerintahan dan organisasi internasional bertindak melakukan upaya-upaya kontra terorisme secara masif dan terstruktur. Lembaga-lembaga kontra terorisme dibentuk dan kerjasama antar negara ditingkatkan. Di Indonesia misalnya, dibentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) sebagai kesatuan khusus yang menangani masalah terkait terorisme. Meski komite kontra terorisme milik PBB, CTC (*Counter Terrorism Committee*) menulis dalam situsnya bahwa upaya penanggulangan terorisme harus memperhatikan HAM, namun pada prakteknya, seringkali terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan dalih kontra terorisme.

Contohnya di Indonesia pasca serangan bom Bali, ratusan orang disiksa dalam proses interogasi, Densus 88 juga dikritik karena melakukan pembunuhan dan penangkapan ilegal.²⁷ Pemerintah Indonesia juga kerap menyematkan istilah teroris untuk gerakan pemberontakan seperti GAM dan OPM. Pemanfaatan isu terorisme untuk kepentingan politik juga terjadi di banyak negara lain. Di India, pemberlakuan undang-undang pencegahan terorisme, *Prevention of Terrorism Act* (POTA) digunakan pemerintah untuk menyasar oposisi dan kaum minoritas di beberapa negara bagian seperti Uttar Pradesh dan Kashmir. Dalam POTA, pemerintah India menggunakan definisi terorisme yang terlalu umum sehingga memperluas kekuasaan negara untuk melakukan investigasi dan proses hukum.²⁸ Misalnya, terduga teroris dapat ditahan hingga tiga bulan tanpa proses hukum.

Hal yang sama juga terjadi di Mesir. Dengan alasan GWOT dan kebijakan-kebijakan keamanan di banyak negara pada masa itu, pemerintah Mesir pada 2003 mengesahkan perpanjangan aturan situasi darurat.

²⁷ Milda Istiqomah, “In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses in Indonesia” (First Asia Pacific Conference on Advanced Research (APCAR-2015), South Australia: Asia Pacific Institute of Advanced Research, 2015), hlm. 343.

²⁸ Human Rights Watch, “In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide | A Human Rights Watch Briefing Paper for the 59th Session of the United Nations Commission on Human Rights,” Human Rights Watch, 25 Maret 2003, <https://www.hrw.org/report/2003/03/25/name-counter-terrorism-human-rights-abuses-worldwide/human-rights-watch-briefing>.

Dengan aturan tersebut, pemerintah Mesir menangkapi banyak aktivis dengan tuduhan terlibat gerakan Ikhwanul Muslimin atau karena mempunyai bacaan yang mencurigakan. Dalam salah satu kasus, aturan ini digunakan untuk menangkap demonstran yang melakukan aksi damai menentang perang Iraq dan kependudukan Israel di Palestina.²⁹

AS yang merupakan negara korban serangan 9/11, pasca kejadian itu banyak menelurkan kebijakan dan perundangan yang melanggar HAM dan hukum internasional. Contoh paling nyata adalah penjara Guantanamo, di mana AS menolak penerapan hasil konvensi Genewa terhadap tahanan perang Afghan maupun anggota al-Qaeda. AS bahkan tidak merespon surat dari PBB yang meminta informasi status legal para tahanan. AS juga mengeluarkan *Domestic Security Enhancement Act of 2003* sebagai aturan yang melegalkan penangkapan imigran, deportasi, dan pencabutan kewarganegaraan AS bagi terduga teroris.³⁰

Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana narasi GWOT menjadi landasan legitimasi untuk memproduksi aturan-aturan perundangan yang politis dan mengandung pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini muncul berdasarkan asumsi yang salah kaprah, bahwa pelanggaran HAM terhadap pelaku tindak terorisme dibutuhkan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu keselamatan generasi selanjutnya dari serangan teroris.

Asumsi ini dibantah oleh Ben Emerson, seorang peneliti HAM di PBB. Menurutnya, pelanggaran HAM terhadap orang-orang yang terduga teroris justru menjadi prakondisi bagi perkembangan terorisme di masa depan.³¹ *Washington Post* melaporkan pernyataan pejabat AS yang meyakini belasan bekas tahanan Guantanamo sebagai pelaku serangan terhadap tentara AS di Afghanistan.³² Dalam laporan lain, disebutkan

29 Human Rights Watch, hlm. 12.

30 Human Rights Watch, hlm. 22-23.

31 Ben Emerson, "Human Rights Abuse in Counter-Terrorism Results in Further Spread of Terrorism," United Nations Brussels, 13 Juli 2012, diakses melalui <https://www.unbrussels.org/human-rights-abuse-in-counter-terrorism-results-in-further-spread-of-terrorism/> pada tanggal 12 Desember 2017.

32 Adam Goldman dan Missy Ryan, "At Least 12 Released Guantanamo Detainees Implicated in Attacks on Americans - the Washington Post," *The Washington Post*, 2016, diakses melalui https://www.washingtonpost.com/world/national-security/about-12-released-guantanamo-detainees-implicated-in-deadly-attacks-on-americans/2016/06/08/004d038e-2776-11e6-b989-4e5479715b54_story.html?noredirect=on&utm_term=.d44b9183672f pada tanggal 13 Desember 2017.

bahwa pelaku serangan mematikan yang menysasar kompleks diplomatik AS di Benghazi, Libya, adalah juga alumni Guantanamo.³³

Tak hanya Guantanamo, Camp Bucca di Iraq juga tempat persemaian benih-benih terorisme. Penjara ini ibarat sekolah yang meluluskan petinggi-petinggi ISIS di kemudian hari. Khalifah ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, pernah mendekam di sana. Abu Muslim al-Turkmani, orang nomor dua ISIS, dan Haji Bakr, komandan strategi perang ISIS yang juga mantan kolonel angkatan udara Saddam, juga merupakan alumni Bucca. Kemunculan ISIS dikemudian hari juga dibantu oleh narasi GWOT yang menjadikan seorang anonim bernama Abu Mus'ab al-Zarqawi sebagai penghubung antara para penggagas serangan 9/11 dengan pemerintah Iraq.³⁴

Pelanggaran HAM yang terjadi dalam operasi kontra terorisme sejatinya merupakan gejala dari karakter sistem politik yaitu biopolitik. Biopolitik bertendensi mengontrol kehidupan manusia modern secara menyeluruh. Jika pada masa pra-modern politik hanya fokus pada aspek negatif dan yudisial, maka biopolitik muncul sebagai kuasa yang positif dan totalitarian. Karena itu, institusi-institusi modern mulai membentuk mekanisme yang membuat manusia melakukan tindakan pendisiplinan mandiri.³⁵

Dalam bukunya *Homo Sacer*, Giorgio Agamben menunjukkan bahwa biopolitik merupakan inti dari konsep penting politik modern, kedaulatan. Melalui kedaulatan, negara modern dapat mengeksekusi kekuasaannya hingga sisi-sisi paling subtil dari kehidupan manusia atas nama hukum.³⁶ Kedaulatan juga memiliki kuasa menggunakan kekerasan di luar hukum dalam situasi eksepsional. Di sini terlihat bahwa kekerasan merupakan aspek inheren dari biopolitik.

33 Adam Goldman, "Former Guantanamo Detainee Implicated in Benghazi Attack," *Washington Post*, 2014, diakses melalui https://www.washingtonpost.com/world/national-security/former-guantanamo-detainee-implicated-in-benghazi-attack/2014/01/07/c73fdf78-77d5-11e3-8963-b4b654bcc9b2_story.html pada tanggal 13 Desember 2017.

34 Joby Warrick, *Black Flags: The Rise of ISIS*, Reprint edition (New York: Anchor, 2016), hlm. 21.

35 Nancy Meyer-Emerick, "Biopolitics, Dominance, and Critical Theory," *Administrative Theory & Praxis* Vol. 26, no. 1 (2004): hlm. 3-4, <https://doi.org/10.1080/10841806.2004.11029433>.

36 Trevor Parfitt, "Are the Third World Poor *Homines Sacri*? Biopolitics, Sovereignty, and Development," *Alternatives: Global, Local, Political* Vol. 34, no. 1 (2009): hlm. 41, <https://www.jstor.org/stable/40645257>.

Paradigma biopolitik modern menjadikan *bare life* sebagai subyek sekaligus obyek kedaulatan.³⁷ *Bare life* adalah subyek ketika ia menjadi unsur dasar politik modern. Dalam politik modern, kedaulatan dibangun atas kelahiran nyawa manusia. Seseorang yang lahir serta merta menjadi warga negara; subjek pembentuk kedaulatan negara bangsa.

*“Rekaan (prinsipil) nampak di sini bahwa kelahiran dengan serta merta menjadi negara, dalam keadaan tiadanya jarak pemisah (scarto) antara dua istilah tersebut.”*³⁸

Paradigma biopolitik inilah yang tereksplisitkan dari pelanggaran kasus HAM dalam operasi kontra terorisme. Kedaulatan negara modern sebenarnya ingin mengontrol manusia hingga sisi-sisi terkecilnya. Melalui penyadapan, sabotase finansial hingga penyiksaan dan pembunuhan ilegal, kedaulatan melemparkan manusia kepada semacam *homo sacer* yang kehidupannya tidak berharga.

Kekerasan sistemik dari GWOT lain adalah bagaimana narasi itu membawa dunia internasional pada legitimasi serangan ke Iraq pada tahun 2003. Melalui sosok Abu Mus’ab al-Zarqawi, AS menuduh pemerintah Iraq terlibat dalam serangan 9/11 dan oleh sebab itu perlu diperangi. Pada akhirnya, dunia internasional kini mengetahui bahwa invasi AS dan sekutunya ke Iraq pada tahun 2003 tidak sah secara hukum internasional karena berdasarkan laporan yang keliru mengenai senjata pemusnah masal. Mantan perdana menteri Inggris, Tony Blair bahkan membuat pernyataan terbuka mengenai kesalahan tersebut.³⁹

Invasi AS ke Iraq merepresentasikan dua bentuk kekerasan objektif, yaitu kekerasan sistemik sekaligus kekerasan simbolik. Ia adalah kekerasan sistemik ketika dilihat sebagai efek katastrofik dari berjalannya suatu sistem yang korup. Melalui regulasi dan legitimasi yang legal, sistem dan pihak berkuasa melakukan kekerasan. Di sisi yang lain, ia merupakan kekerasan simbolik saat dilihat sebagai konsekuensi narasi biner, *with us or against us*, yang mendasari GWOT.

37 Giorgio Agamben dan Daniel Heller-Roazen, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life* (Stanford: Stanford University Press, 2016), hlm. 148.

38 Agamben dan Heller-Roazen, hlm. 128.

39 BBC News, *Tony Blair Tells of “Sorrow and Regret” Over Iraq - BBC News* (Central London, 2016), diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=bfR7TKtfKtg>.

Sementara itu, tindak terorisme, menurut perspektif Zizek hanyalah salah satu bentuk kekerasan subjektif.⁴⁰ Melalui pembagian kekerasan menjadi subjektif dan objektif, Zizek ingin menunjukkan selubung ideologi yang menjadi penghalang kita untuk dapat melihat segala fenomena kekerasan secara adil. Apa bedanya antara 9/11 dengan pemboman Charillo, Panama, yang juga menewaskan kurang lebih ribuan orang?⁴¹ Apa bedanya operasi ISIS dengan tindakan tentara AS pasca perang Iraq yang dapat membunuh warga Iraq tanpa prosedur?⁴² Perbedaannya adalah tindak terorisme dianggap sebagai gangguan bagi kondisi normal, sementara kekerasan lainnya merupakan kondisi normal tersebut.

Pemikiran Zizek mengenai terorisme khususnya dan kekerasan secara umum memiliki relevansi dengan kritik ideologi. Dengan mendedah kekerasan objektif dari sistem global, ia sebenarnya tengah melakukan kritik terhadap ideologi kapitalisme. Dengan modus post-politiknya, kapitalisme global mengklaim sebagai ruang netral ideologi serta telah mengesampingkan kepentingan politik dalam mewujudkan kesejahteraan dan keamanan umat manusia. Faktanya, dalam klaim kesejahteraan, terdapat eksploitasi dan relasi kuasa menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang. Dalam klaim keamanan, sistem global telah melakukan kekerasan secara terstruktur.

KESIMPULAN

Melalui GWOT, pemerintah AS ingin mengajak dan melibatkan seluruh dunia untuk menghadapi tantangan umat manusia masa kini, yakni terorisme. Dengan klaim usainya pertarungan ideologis, sistem demokrasi liberal memperkenalkan suatu visi global untuk mengupayakan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, terorisme adalah masalah yang harus ditumpas.

40 Zizek, *Violence*, hlm. 206.

41 Noam Chomsky, *Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World* (Cambridge: South End Press, 2002), hlm. 147.

42 Gwynne Dyer, *Don't Panic!: ISIS, Terror and Today's Middle East* (Toronto: Random House Canada, 2015), hlm. 60.

Dalam upaya memberantas terorisme, GWOT memberlakukan logika biner yang membagi dunia ke dalam dua himpunan antagonis, antara pihak yang memerangi diperangi. Tidak ada jalan tengah antara keduanya. Keuniversalan dan tendensi dikotomis inilah yang mengandung kekerasan objektif dilihat dari teori kekerasan Zizek, kekerasan yang luput dari perhatian karena dianggap sebagai kondisi normal.⁴³ Kekerasan objektif mengejawantah dalam dua wujud, simbolik dan sistemik.

Kekerasan simbolik hadir ketika term-term kebahasaan dipaksakan secara universal sehingga mengekang realitas. GWOT menjelma kekerasan objektif dalam bentuk kekerasan simbolik ketika narasi biner, *with us or against us*, membawa konsekuensi eksklusi dan marjinalisasi kelompok-kelompok yang terduga teroris maupun terkait dengan jaringan teroris.

Kekerasan sistemik dari GWOT muncul ketika ia bekerja secara sistematis memproduksi aturan-aturan legal yang melanggar hak-hak mendasar kemanusiaan. Misalnya, di negara-negara seperti India dan Mesir, GWOT menjadi landasan bagi aturan-aturan legal yang dimanfaatkan untuk merepresi kaum minoritas dan lawan politik. GWOT menjadi narasi yang dimanfaatkan banyak pihak untuk kepentingan politis.

Kekerasan objektif adalah kekerasan yang kehadirannya diabaikan karena dianggap normal. Ketika drone AS menewaskan warga di pedalaman Pakistan, salah satunya Manama Bibi, AS dunia tak memperhatikannya karena kejadian itu dibingkai dalam narasi perang melawan terorisme.⁴⁴ Pelanggaran HAM dalam proses penangkapan ilegal, interogasi dengan penyiksaan hingga pembunuhan orang yang belum tentu berdosa terjadi di mana-mana karena narasi GWOT.

Hal ini perlu dikritik karena berangkat dari asumsi yang keliru bahwa tindakan apapun diperlukan untuk menumpas terorisme. Faktanya, pelanggaran HAM terhadap terduga teroris dan sikap tak mengindahkan hukum internasional justru memantik lahirnya benih-benih teroris baru. Contoh paling nyata adalah bagaimana ISIS muncul dari konteks internal Iraq pasca invasi AS.⁴⁵ Invasi tersebut selain berdasarkan tuduhan kepemilikan senjata

43 Zizek, *Violence*, hlm. 2.

44 Amnesty international, *Will I Be next ?*, hlm. 18.

45 Lihat Dyer, *Don't Panic!*

pemusnah masal juga karena tuduhan keterkaitan pemerintahan Saddam dengan perancang serangan 9/11.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Goldman. "Former Guantanamo Detainee Implicated in Benghazi Attack." *Washington Post*, 2014. diakses melalui https://www.washingtonpost.com/world/national-security/former-guantanamo-detainee-implicated-in-benghazi-attack/2014/01/07/c73fdf78-77d5-11e3-8963-b4b654bcc9b2_story.html pada tanggal 13 Desember 2017.
- Adam Goldman dan Missy Ryan. "At Least 12 Released Guantanamo Detainees Implicated in Attacks on Americans - the Washington Post." *The Washington Post*, 2016. diakses melalui https://www.washingtonpost.com/world/national-security/about-12-released-guantanamo-detainees-implicated-in-deadly-attacks-on-americans/2016/06/08/004d038e-2776-11e6-b989-4e5479715b54_story.html?noredirect=on&utm_term=.d44b9183672f pada tanggal 13 Desember 2017.
- Agamben, Giorgio, dan Daniel Heller-Roazen. *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford: Stanford University Press, 2016.
- Amnesty international. *Will I Be Next?: Us Drone Strikes in Pakistan*. New York, N.Y.: Amnesty International, 2013.
- BBC News. *Tony Blair Tells of "Sorrow and Regret" Over Iraq - BBC News*. Central London, 2016. diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=bfR7TKtfKtg>.
- Ben Emerson. "Human Rights Abuse in Counter-Terrorism Results in Further Spread of Terrorism." United Nations Brussels, 13 Juli 2012. diakses melalui <https://www.unbrussels.org/human-rights-abuse-in-counter-terrorism-results-in-further-spread-of-terrorism/> pada tanggal 12 Desember 2017.
- Blejić, Dusan. "Pengantar." *Slavic Review* Vol. 72, no. 4 (2013). <http://www.slavicreview.illinois.edu/indexes/vol72/index.html>.
- Borradori, Giovanna, Jürgen Habermas, dan Jacques Derrida. *Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida*. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

- Butler, Judith, Ernesto Laclau, dan Slavoj Žižek. "Holding the Place." In *Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues on the Left*. London: Verso, 2011.
- Chomsky, Noam. *Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World*. Cambridge: South End Press, 2002.
- Dyer, Gwynne. *Don't Panic!: ISIS, Terror and Today's Middle East*. Toronto: Random House Canada, 2015.
- Elliott, John E. "Marx and Schumpeter on Capitalism's Creative Destruction: A Comparative Restatement." *The Quarterly Journal of Economics* Vol. 95, no. 1 (1980). <https://doi.org/10.2307/1885348>.
- Human Rights Watch. "In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses Worldwide | A Human Rights Watch Briefing Paper for the 59th Session of the United Nations Commission on Human Rights." Human Rights Watch, 25 Maret 2003. <https://www.hrw.org/report/2003/03/25/name-counter-terrorism-human-rights-abuses-worldwide/human-rights-watch-briefing>.
- International Committee of the Red Cross. *Icrc Report on the Treatment of Fourteen "High Value Detainees" in Cia Custody*. Washington, D.C.: International Committee of the Red Cross, 2007.
- Istiqomah, Milda. "In the Name of Counter-Terrorism: Human Rights Abuses in Indonesia." South Australia: Asia Pacific Institute of Advanced Research, 2015.
- Meyer-Emerick, Nancy. "Biopolitics, Dominance, and Critical Theory." *Administrative Theory & Praxis* Vol. 26, no. 1 (2004). <https://doi.org/10.1080/10841806.2004.11029433>.
- Parfitt, Trevor. "Are the Third World Poor Homines Sacri? Biopolitics, Sovereignty, and Development." *Alternatives: Global, Local, Political* Vol. 34, no. 1 (2009). <https://www.jstor.org/stable/40645257>.
- Polimpung, Hizkia Yosie. *Asal-Usul Kedaulatan : Telusur Psikogenealogis Atas Hasrat Mikrofasis Bernegara*. Depok: Penerbit Kepik, 2014.
- Raab, Michael Josef. *The Terrorist in a Postmodern Perception*. S.l.: AV AkademikerVerlag, 2014.

- Schmid, Alex Peter. "Terrorism - The Definitional Problem." *Case Western Reserve Journal of International Law* Vol. 36, no. 2 (2004). <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol36/iss2/8>.
- . *The Routledge Handbook of Terrorism Research*. New York; London: Routledge, 2013.
- Sharpe, Matthew, dan Geoff Boucher. *Zižek and Politics: A Critical Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010.
- Smelser, Neil J. *The Faces of Terrorism: Social and Psychological Dimensions*. STU-Student edition. New Jersey: Princeton University Press, 2007. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt7rqvk>.
- U.S. Department of State, The Coalition Information Centers. "The Global War on Terrorism: The First 100 Days," n.d. diakses melalui <https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/wh/6947.htm>.
- Warrick, Joby. *Black Flags: The Rise of ISIS*. Reprint edition. New York: Anchor, 2016.
- Wood, Kelsey. *Zizek: A Reader's Guide*. Malden: Wiley-Blackwell, 2012.
- Zižek, Slavoj. *The Sublime Object of Ideology*. London: Verso, 2009.
- Zizek, Slavoj. *Violence*. New York: Picador, 2008.

